

TANTANGAN ILMU-ILMU SOSIAL

By Syarief Makhya

MASALAH, PEMBAHARUAN DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN ILMU-ILMU SOSIAL¹⁾

Oleh Syarief Makhya²⁾

Abstrak

8

Perkembangan dan realitasnya Ilmu Sosial di Indonesia hingga sekarang masih didominasi oleh pemikiran dan teori yang dikembangkan dari Barat dan cenderung hanya meniru dan memperkuat teori yang ada serta berorientasi pada kepentingan yang pragmatis. Dengan kata lain, Ilmu sosial di Indonesia tidak dibangun atas dasar cita-cita etik yang berakar pada realitas dan kultur masyarakat Indonesia.

Beberapa persoalan ilmu sosial antara lain karena ilmu sosial tidak memiliki cita-cita etik, keringnya atmosfir budaya akademik, penerapan administrasi penelitian yang kaku atau tidak adaptif dengan lingkungan organisasi perguruan tinggi, dan kecenderungan berkembangnya pragmatisme pendidikan

Pembaharuan ilmu sosial di Indonesia harus dibangun dengan menjawab ke arah mana dan untuk kepentingan apa ilmu sosial mau dikembangkan. Mengembangkan ilmu sosial bukan hanya sebatas penyediaan pendidikan formal pada jenjang pendidikan Ilmu sosial di perguruan tinggi tetapi juga harus ditujukan untuk kepentingan memperbaiki kehidupan masyarakat yang lebih bermakna.

Kata kunci : Pembaharuan Ilmu sosial, Kepentingan Ilmu Sosial

7

¹⁾ Disampaikan pada Seminar Nasional tentang " Tantangan Ilmu – Ilmu Sosial dalam menghadapi Bonus Demografi 2020-2030.", Yang dilaksanakan oleh FISIP Universitas Lampung pada tanggal 9 Nopember 2016 di Hotel Horizon, Bandar Lampung

²⁾ Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung

PENDAHULUAN

Pasca pemerintahan Orde Baru, keberadaan ilmuwan sosial di Indonesia dalam kepentingan praktis sangat fungsional dalam menjelaskan perubahan sosial-politik yang sedang berlangsung di negeri ini. Hampir semua fenomena perubahan sosial-dan politik yang bergulir di negeri ini tidak luput dari pengamatan dan telaah para ahli ilmu sosial. Setiap hari di media elektronik atau di media cetak, para ahli ilmu sosial (Politik, Pemerintahan, Komunikasi, Administrasi Publik, Hukum, Ekonomi, Sosiologi, dan Psikologi) berbicara tentang persoalan-persoalan fenomena sosial-politik yang sedang terjadi di Indonesia.

Kemudian dalam perkembangan lima tahun terakhir ini terlepas dari pro-kontra, muncul kehadiran lembaga-lembaga survey di Indonesia, yang melakukan survey terhadap hasil pilkada, elektabilitas calon anggota Dewan, calon presiden dan calon kepala daerah, sebuah fenomena baru dalam membangun tradisi pemetaan persaingan politik yang berbasis riset yang di era sebelumnya tidak ada survey-survey tersebut

Kebebasan berpendapat dan semakin terbukanya media masa ternyata memberi ruang bagi ilmuwan sosial untuk mengembangkan kemampuan akademiknya dalam merespon persoalan-persoalan sosial-politik, melalui penelitian atau hanya sebatas pengamatan dan penyampaian gagasan di berbagai media.

Demikianhalnya, pada tataran pendidikan tinggi, ¹⁵ beberapa perguruan tinggi di Jawa dan Luar Jawa ¹⁴ mengembangkan studi S2 dan S3 di bidang ilmu sosial dan ilmu politik. Setidak-tidaknya, dengan adanya jumlah masyarakat Indonesia yang berpendidikan S2 dan S3 diharapkan ada signifikansinya terhadap peningkatan dan pengembangan ilmu sosial di Indonesia.

Apakah fenomena menguatnya peran ilmuwan sosial dan menjamurnya pendidikan S2 dan S3 di Universitas dan berkembang kegiatan survey-survey politik, ilmu sosial di Indonesia bisa dikategorikan sudah mengalami kemajuan yang berarti?

Jawaban atas pertanyaan ini, bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Mereka yang melihat fenomena perkembangan ilmu sosial dari sudut pandang aspek kegunaan pada tataran praktis barangkali akan ⁸ sampai pada kesimpulan bahwa ilmu sosial di Indonesia memiliki perkembangan yang positif seiring dengan dinamika sosial-politik sebagai akibat dari proses demokrasi yang sedang

berlangsung di Indonesia. Namun, dalam pendapat Purwanto (2002) memberikan penilaian lain yaitu "para ilmuwan sosial di Indonesia tidak lagi berfungsi sebagai pemikir dan peneliti, melainkan telah berubah menjadi pekerja paruh waktu berbasis pada proyek yang cenderung bersifat sementara. Sementara, pendidikan ilmu sosial, yang sejak lama tidak lagi menjadi pendidikan keilmuwan melainkan telah menjadi pendidikan profesi."

Kecenderungan yang sama juga dinyatakan Santoso (2011) "Ilmu Sosial di Indonesia mengalami kemandekan dan krisis. Gejalanya antara lain tampak pada kontribusi para ilmuwan sosial dalam pengembangan ilmu, baik di tataran teoritik maupun metodologis, belum bisa dibanggakan. Ilmuwan sosial di negeri ini masih terkesan terombang-ambing menentukan aliran atau mazhab yang ditawarkan para teoritikus asing. Selain itu, ketika berdebat tentang politik dan pemerintahan di Indonesia, rujukannya adalah Indonesianis non-Indonesia".³⁾

Pernyataan yang dikemukakan Santoso tersebut, sebenarnya sekitar 30 tahun yang lalu, juga pernah disampaikan hal yang sama oleh Tjokrowinato (1984:186) bahwa terjadi infertilitas ilmu-ilmu sosial yaitu "kekurang-mampuan menghasilkan konsep, konstruk, teori dan metodologi. Ilmuwan sosial bukan hanya mampu mendeskripsikan perubahan sosial yang terjadi, tetapi juga harus mampu menerangkan (*explaining*), memprediksikan dan mengarahkan proses perubahan sosial yang terjadi".

Makalah ini mencoba mendiskusikan tentang fenomena ilmu sosial di Indonesia, dengan mengkaji dan mendiskusikan apakah benar ilmu sosial di Indonesia mengalami kemandekan dan mengalami krisis. Kemudian, akan dicoba diurai tentang pembaharuan ilmu sosial dan kaitannya dengan peradaban sosial-politik di Indonesia.

³⁾ Purwo Santoso. *Ilmu Sosial Transformatif*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Tanggal 19 April 2011 di Yogyakarta.

KEMANDEKAN DAN KRISIS ILMU SOSIAL?

3 Perguruan tinggi mempunyai peran antara lain mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Jadi, perguruan tinggi bukan hanya sebatas memproduksi pendidikan akademik pada jenjang S1, S2 dan S3 atau mengembangkan pendidikan professional sebagaimana kecenderungan sekarang ini, tetapi juga mampu mengembangkan ilmu dan menyebarluaskannya.

Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu memiliki makna bahwa ilmu harus berkembang atau mengalami kemajuan yang diukur dari aspek kemutakhiran pengembangan teori, metodologi, basis filosofis serta ilmu harus disebarluaskan untuk kepentingan pemanfaatan dan kegunaannya dalam membangun kehidupan masyarakat dan Negara.

Dalam perspektif tersebut, maka muncul perdebatan tentang posisi ilmu sosial itu sendiri, apakah ilmu sosial itu berada dalam posisi yang netral, termasuk netral dari kepentingan politik dan ekonomi negara-negara lain? Perdebatan ini memunculkan implikasi terhadap keberadaan ilmu sosial. Mereka yang mengasumsikan bahwa ilmu sosial bersifat netral maka kerangka teori atau konsep yang dikembangkan di barat bisa juga dipraktekan atau diterapkan di Indonesia, dalam perspektif ini teori-teori sosial diperlakukan sebagai kebenaran dan fakta universal (Santoso, 2012).

Apa dampaknya memahami ilmu sosial seperti itu yaitu, ilmuwan sosial Indonesia menjadi sangat tergantung pada produk pemikiran teori dan konsep yang dikembangkan di Barat. Fenomena sosial-politik yang terjadi di Indonesia, harus dilihat dari kacamata konsep dan teori yang dikembangkan di Barat. Dalam kerangka pemahaman seperti tersebut, maka penelitian-penelitian sosial-politik di Indonesia hanya sebatas menguji teori yang dikembangkan di Barat atau meminjam konsep dan teori yang dikembangkan di Barat untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena sosial yang terjadi di Indonesia. Dengan kata lain, penelitian-penelitian sosial itu hanya terbatas memperkuat teori yang sudah ada, inilah yang disebut bahwa ilmu sosial itu mendeg (*stagnat*) (Kantaprawira, 2009).

Cara pandang lain yaitu bahwa ilmu sosial di Indonesia bisa dikembangkan menurut konteks ke Indonesiaan. Misalnya, Penelitian yang dilakukan Anderson (1984) tentang kekuasaan dalam kebudayaan Jawa, ternyata konsep kekuasaan barat bisa dibedakan dengan konsep kekuasaan dalam tradisi kultur Jawa. Contoh lain, Moeljarto Tjokrowinoto (1984:190) menyebut beberapa konsep yang pernah hidup di era Orde Lama, seperti “Nasakom, Ekonomi Terpimpin, Neo-Kolonialisme, Revolusi Belum Selesai, dst. Atau di era Orde Baru ada konsep monoloyalitas, normalisasi kehidupan kampus (NKK), atau Pola Hidup Sederhana yang tidak terjamah oleh ilmuwan sosial¹ di Indonesia. Sementara Santoso (2011) menyebut sebuah contoh dalam pengembangan teori¹ politik, khususnya teori demokrasi. Misalnya, di era Orde Baru konsep musyawarah begitu gencar di ditonjolkan pemerintah, dan para ilmuwan politik begitu gencar juga mencercanya. Namun, pasca Orde Baru, muncul teori *deliberative democracy*⁴ yang dikembangkan oleh ilmuwan mancanegara.

Dari beberapa contoh tersebut menjadi jelas bahwa prinsipnya realitas sosial-politik yang berkembang di Indonesia, bisa dilihat dari alat ukur sendiri tanpa harus memaksakan dipotret dari kaca mata teori dan konsep yang dikembangkan di Barat.

PEMBAHARUAN ILMU SOSIAL

Dalam perspektif bahwa ilmu itu tidak netral, maka harus ada kemauan dan kerja keras dari para ilmuwan dan pengkaji ilmu sosial bahwa pengembangan dan keberadaan ilmu sosial harus diperbaharui yang sesuai dengan realitas sosio-politik dan kultur masyarakat Indonesia. Artinya, pembaharuan ilmu sosial harus berangkat pada tujuan, untuk apa ilmu sosial diked³bangkan dan bagaimana implikasinya dalam menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa ini?

Oleh karena itu, mengembangkan ilmu-ilmu sosial bukan hanya sebatas dipahami pada penyediaan pendidikan formal dari SD sampai ke PT, tetapi juga bermakna adanya tanggung jawab untuk

⁴) Demokrasi bersifat deliberatif yaitu jika proses pemberian alasan atas sesuatu kandidat kebijakan publik diuji lebih dahulu melalui proses konsultasi publik atau “diskursus publik”. (Hardiman, 2009). Konsep demokrasi deliberatif bisa membantu untuk mengimplementasikan kekhasan budaya demokrasi yang sudah mentradisi dalam pemerintahan di Indonesia, seperti rapat desa, rembug desa atau prinsip musyawarah dalam proses pengambilan keputusan, hanya saja konteksnya dalam sistem demokrasi.

membangun bangsa Indonesia ke depan. Implikasinya, bahwa pendidikan dan pengembangan ilmu sosial bukan hanya memenuhi target kuantitatif yaitu meningkatnya jumlah masyarakat terdidik, tetapi juga harus memberi bentukan dan dampak terhadap kepentingan negara yang akan dibangun.

Oleh sebab itu, secara kritis harus dipertanyakan apa sesungguhnya substansi yang dipelajari dalam studi ilmu sosial, karena akan memberi dampak terhadap pembentukan perilaku masyarakat atau sistem yang akan dikembangkan. Argumen ini dikemukakan oleh Santoso (2011) bahwa “penerapan teori ke dalam kehidupan masyarakat adalah suatu pertaruhan nasib. Penerapan paket-paket teori impor, apalagi yang belum sempat dikaji-sesuaikan dengan kondisi negeri ini acapkali memunculkan sejumlah persoalan baru”.

Beberapa persoalan dasar yang terkait dengan substansi ilmu sosial yang cenderung mengasumsikan netral dan cenderung madeg antara lain karena persoalan sifatnya ideologis, keringnya atmosfer budaya akademik, penerapan administrasi penelitian yang kaku atau tidak adaptif dengan lingkungan organisasi perguruan tinggi, dan kecenderungan berkembangnya pragmatisme pendidikan.

Secara ideologis, visi ilmu sosial di Indonesia tidak dirumuskan pada perwujudan cita-cita etik, tetapi hanya sebatas memenuhi kepentingan standar manajemen PT yaitu bahwa PT harus memiliki Visi dan Renstra, tetapi substansi Visi atau Renstra Universitas hanya mengejar target performa kinerja PT agar memiliki daya saing dan bisa memposisikan PT berkelas Nasional atau berkelas International, tanpa mempertimbangkan apakah punya dampak terhadap kepentingan memperbaiki kehidupan masyarakat yang lebih bermakna.

Sebuah contoh seorang dosen atau tenaga pengajar cenderung hanya berkuat untuk mengejar kenaikan pangkat. Apakah hasil-hasil penelitiannya bermanfaat bagi kepentingan masyarakat atau berkontribusi untuk pengembangan ilmu tidak menjadi perhatiannya. Akibatnya, setelah mencapai jenjang jabatan akademik menjadi guru besar, aktivitas penelitian terhenti, dan yang diburu adalah jabatan struktural (Rektor, Pembantu Rektor, Dekan dst). Jadi, aktivitas penelitian atau pengabdian kepada masyarakat hanya berorientasi untuk kenaikan pangkat dan target publikasi ilmiah.

Di samping itu, penelitian ilmu sosial yang dikembangkan di Indonesia cenderung tidak menghasilkan temuan baru, bahkan sekelas penelitian disertapun tidak ada hal-hal baru baik dari segi teori maupun pengembangan konsep. Penulisan karya ilmiah dari S1 sampai S3 hanya sebatas melaksanakan prosedur kegiatan penelitian. Apabila prosedur penelitian benar dan penulisan sudah memenuhi kaidah penulisan karya ilmiah maka sudah dianggap layak, bahkan ironisnya dengan standar seperti itupun masih ada penelitian dan penulisan karya ilmiah yang masuk dalam kategori plagiarism.

Persoalan lain yaitu terjadi kekeringan atmosfer budaya akademik. Tradisi seminar ilmiah, menulis buku referensi atau buku teks, pembahasan buku dan teori-teori baru, pengembangan metodologi penelitian, penulisan-penulisan karya ilmiah di jurnal, masih terbatas dan sangat kurang, bahkan nyaris budaya akademis di PT berubah menjadi budaya birokrasi. Kehebatan seorang dosen bukan dilihat dari produktivitas karya ilmiahnya, tetapi dilihat dari serentetan jabatan struktural yang pernah dipegang di kampus.

Kondisi lain yaitu prosedur dan administrasi pengelolaan keuangan untuk penelitian dan pengabdian cenderung mengikuti disiplin birokrasi pemerintahan pada umumnya yaitu harus tepat waktu dan bukti pengeluaran keuangan sangat kaku, akibatnya penelitian harus menyesuaikan dengan prosedur administrasi keuangan, pada hal untuk melakukan penelitian tidak bisa disamaratakan, karena tingkat bobot dan kesulitannya sangat beragam.

Pendidikan di Indonesia juga cenderung pragmatis. Nilai-nilai idealitas PT untuk mengembangkan ilmu terpingirkan oleh kepentingan-kepentingan yang pragmatis. Prinsip efisiensi pendidikan, target kuantitas mahasiswa dan lulusan, serta berlangsungnya komersialisasi pendidikan, sekarang ini sudah menjadi identitas kelembagaan PT.

Berangkat dari persoalan dasar madeknya pengembangan ilmu sosial di Indonesia, maka pembaharuan ilmu sosial menjadi sebuah kebutuhan. Pembaharuan ilmu sosial bisa dilakukan dalam dua hal yaitu subtansi pengembangan ilmu dan pembaharuan dari aspek manajemen PT.

Pertama dari aspek subtansi, pengembangan ilmu sosial di Indonesia harus keluar dari *mainstream* yang dikembangkan selama ini, yaitu cenderung mengimpor ilmu pengetahuan, tidak dipahami

basis filosofis teori yang diimpor tersebut, dari aspek aksiologisnya cenderung tidak terlalu signifikan dalam memecahkan problema sosial-politik di Indonesia, dan tradisi pengembangan ilmu sosial yang tidak menghasilkan konsep, teori dan temuan yang baru.

Oleh karena itu, pengembangan ilmu sosial di Indonesia, harus memiliki tujuan etik ke arah mana ilmu sosial itu mau dikembangkan dan untuk kepentingan apa ilmu sosial itu dikembangkan.

Kedua, manajemen PT harus dirubah yaitu harus lebih mengedepankan kultur akademik daripada kultur administrasi. Penghargaan dan prestasi bukan diukur oleh budaya birokratik, tetapi harus diukur oleh kemampuan menghasilkan produktivitas ilmiahnya. Demikian halnya, dalam manajemen penelitian atau pengabdian kepada masyarakat harus diarahkan pada proses pertanggungjawaban penelitian dan pengabdiannya, bukan terbatas hanya pada aspek pertanggungjawaban administrasi dan keuangannya

Mengembangkan ilmu sosial di Indonesia bukan hanya sebatas memenuhi target pencapaian Visi atau Renstra PT, Fakultas dan Jurusan, tetapi juga harus mempunyai implikasi mampu memecahkan masalah-masalah sosial-politik melalui sebuah aktivitas Tri Darma Perguruan Tinggi. Kemampuan melakukan ketiga aktivitas Tri Darma PT tersebut, sekali lagi tidak dalam posisi netral. Oleh sebab itu, pengembangan ilmu sosialnya tidak harus selalu merujuk ilmu sosial yang dikembangkan di barat, tetapi tetapi bisa beranjak dari pemahaman realitas sosio-kultural masyarakat Indonesia.

Penutup.

Pengembangan ilmu sosial di Indonesia harus berangkat dari visi untuk mengembangkan ilmu yang berorientasi pada cita-cita etik, bukan visi dalam pengertian yang bersifat teknis. Dalam perspektif demikian, maka pengembangan dan proses pembelajaran ilmu sosial bukan hanya hanya mengejar target produktivitas dan efisiensi atau mengkomersialisasikan ilmu untuk kepentingan memaksimalkan keuntungan ekonomis, tetapi **seberapa jauh ilmuwan sosial itu mampu memberi kontribusi terhadap masyarakat dan lingkungannya.**

Implikasinya, para sarjana ilmu sosial sebagai pengemban ilmu sosial, harus merumuskan garis dan pilihan ilmu yang jelas ke arah mana ilmu sosial itu mau dikembangkan dan untuk kepentingan siapa ilmu sosial itu dikembangkan. Para ilmuwan sosial di Indonesia tidak lagi didominasi oleh ilmu sosial yang diimpor dari Barat yang hanya sebatas meniru dan memperkuat teori yang ada.

Selain itu, ilmuwan sosial harus memulai mengembangkan ilmu dengan memahami basis filosofis masyarakatnya dan membangun dan mengembangkan kerangka berpikir keilmuannya harus mengadopsi sistem nilai yang ada dalam masyarakatnya.

5 DAFTAR PUSTAKA

Anderson, Benediet R.O'G. 1984. *Gagasan tentang Kekuasaan Dalam Kebudayaan Jawa*. Dalam buku **Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa**. Meriam Budiarmo (Penyusun). Jakarta: Sinar Harapan.

12
Hardiman, F.Budi. 2009. *Demokrasi Deliberatif*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

10
Kantaprawira, Rusadi. 2009. *Filsafat & Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. Bandung: AIPI Bandung dan Puslit KP2W Lembaga Penelitian UNPAD

16
Purwanto, Bambang. 2002. *Apa yang Dapat Disumbangkan Ilmu Sosial di Indonesia*. Makalah pada Seminar Nasional Dies Natalis Fisipol UGM ke-47 dengan tema "Kemacetan Ilmu-ilmu Sosial dan Tantangan Perubahan ke Depan", Yogyakarta, 25 September 2002.

2
Santoso, Purwo. 2011. *Ilmu Sosial Transformatif*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Tanggal 19 April 2011 di Yogyakarta.

Tjokrowinoto, Moeljarto. 1984. *Krisis Kepercayaan Terhadap Peran Ilmu-Ilmu Sosial di Indonesia*. Dalam buku **Krisis Ilmu-Ilmu Sosial dalam Pembangunan Dunia Ketiga**, Yogyakarta : PLP2M

Bio Data

4

Syarief Makhya, bekerja sebagai dosen tetap di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, sejak tahun 1985 sampai sekarang. Menyelesaikan Studi S1 di Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad, dan S2 di bidang Kebijakan Publik di Universitas Brawijaya. Tahun 2012, menyelesaikan studi S3 Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjadjaran. Aktif sebagai pemakalah dalam berbagai seminar dan menulis opini di koran al : di Media Indonesia, Merdeka, Pikiran Rakyat, Lampung Post, Sriwijaya Post, dll dalam bidang HAM, Politik, kebijakan publik, dan Pemerintahan lokal. Menulis beberapa buku, antara lain : Demokratisasi Bermasalah (Catatan Dinamika Politik Lampung)

TANTANGAN ILMU-ILMU SOSIAL

ORIGINALITY REPORT

12%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	pidato.net Internet	53 words — 2%
2	id.scribd.com Internet	43 words — 2%
3	alumni-ut.com Internet	31 words — 1%
4	adoc.tips Internet	28 words — 1%
5	mafiadoc.com Internet	20 words — 1%
6	jurnal.bakrie.ac.id Internet	20 words — 1%
7	repository.radenintan.ac.id Internet	19 words — 1%
8	www.scribd.com Internet	16 words — 1%
9	ulunlampung.blogspot.com Internet	11 words — < 1%
10	chae-sumi.blogspot.com Internet	10 words — < 1%
11	vdocuments.mx Internet	10 words — < 1%

12	pdfs.semanticscholar.org Internet	9 words — < 1%
13	blog-agenda18.blogspot.com Internet	8 words — < 1%
14	info-pendidikan.com Internet	8 words — < 1%
15	media.neliti.com Internet	8 words — < 1%
16	jurnalyics.tripod.com Internet	7 words — < 1%

EXCLUDE QUOTES ON

EXCLUDE MATCHES OFF

EXCLUDE
BIBLIOGRAPHY ON